



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARTO**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **794372**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 694.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/80 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 349.400.000
2. Tanah Seluas 494 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 160.550.000
3. Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA KENDAL, Rp. 184.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.500.000

1. MOTOR, VESPA SPRINT 150 CC Tahun 1979, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11BFD A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.466.411

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 827.966.411

III. HUTANG Rp. 70.744.810

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 757.221.601

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.